

---

**Peran Kepala Sekolah dan Partisipasi dari Masyarakat dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah unruk Mewujudkan Kualitas Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Madiun**

**Ersin Indrangingrum**

Kementrian Agama Kota Madiun, Jl. Mayjen D.I Panjaitan No.3 Madiun 63133, Indonesia

Email: [ersin123751@gmail.com](mailto:ersin123751@gmail.com)

**Abstrak**

*Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan dan menganalisis peran kepala sekolah serta mengetahui partisipasi masyarakat dalam implementasi MBS untuk mewujudkan kualitas pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Madiun. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah fenomenologi. Subyek penelitian adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, komite sekolah, dan masyarakat sekitar yang peduli akan pendidikan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi. Analisis data dengan menggunakan triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan kepala sekolah mampu melaksanakan perannya dengan baik, partisipasi masyarakat baik secara materiil dan non materiil sangat membantu dalam mewujudkan kualitas pendidikan di MTs Negeri Kota Madiun.*

**Kata kunci:** manajemen berbasis sekolah; partisipasi masyarakat; kepala sekolah.

***The Use of Take and Give Method To Increase Students' Study Motivation and Achievement Territory Autonomy Material SMP Negeri 3 Maospati Magetan***

**Abstract**

*This study, therefor, to describe and aims to know of the the role of the headmaster and find out the community participation of the society into Implementation of School Based Management to formed the qualiy of education in State Islamic Junior Haigh School Madiun. In this research, writer use qualitative approach as research method and fenomenology and research genre. This subject of research is the haeadmaster and the vic headmaster, school comitte, and the societynear the school who can to education. Interview and observation is used as collecting data technique. Sours triangulation, technic and time is used to analyse this data. And the result of research shows that headmaster uble to do his role favourably, the society contribution wether physically or non physically or non physically are realy helpful to perform the quality of education at State Islamic Junior High School Madiun.*

**Keywords:** participation society; school based management; the headmaster.

## **Pendahuluan**

Peningkatan kualitas pendidikan merupakan bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia yang merupakan prasyarat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Peningkatan kualitas pendidikan yang diharapkan sesuai dengan tujuan pendidikan menuntut pemahaman dari berbagai pihak. Kualitas pendidikan dikatakan baik apabila telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari delapan yakni standar : isi, proses, kompetensi lulusan, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pengelolaan, dan pembiayaan. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pendidikan yang diselenggarakan pemerintah melalui sistem sentralisasi belum mampu mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan secara maksimal. Perubahan kebijakan pendidikan dari sentralisasi menjadi desentralisasi sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, sehingga pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri termasuk kebijakan dalam hal pendidikan belum terlaksana secara maksimal walaupun pelaksanaan desentralisasi pendidikan sudah lama diterapkan di Indonesia seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah pada pasal 1 ayat 7 yang berbunyi, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang -undangan. Dampak dari pelaksanaan otonomi daerah berpengaruh juga di dalam pelaksanaan pendidikan. Peran dari pemerintah daerah bertanggung jawab penuh terhadap peningkatan kualitas pendidikan yang berdampak juga pada jenjang satuan pendidikan. Pada jenjang satuan pendidikan sekolah harus dapat bertanggung jawab untuk mengelola dan mengurus sekolahnya sendiri melalui mekanisme yang sering disebut manajemen berbasis sekolah (MBS). Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan alternatif dari otonomi dalam bidang pendidikan untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, efisiensi dan pemerataan pendidikan yang sesuai dengan keinginan masyarakat.

Kualitas pendidikan adalah mutu atau tingkat baik buruknya suatu pendidikan berdasarkan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Pencapaian kualitas atau mutu pendidikan untuk pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada delapan standar nasional pendidikan yang terdiri dari standar: isi, proses, kompetensi lulusan, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan. Hidayah (2016:129) menjabarkan kualitas pendidikan merupakan suatu yang intangible (hal yang tidak bisa diraba), yaitu kualitas pendidikan yang sukar diraba dan sulit untuk diukur standarnya kecuali dengan mengkuantitaskan segala sesuatu. Peningkatan mutu pendidikan melalui MBS menurut Mulyasa (2015:179) mempunyai tujuan khusus untuk: (a)meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan intensif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia, (b)meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama, (c) meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolahnya, (d) meningkatkan kompetensi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai.

Pelaksanaan otonomi daerah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah pada pasal 1 ayat 7 yang berbunyi, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai

dengan peraturan perundang-undangan. Dampak dari pelaksanaan otonomi daerah berpengaruh juga di dalam pelaksanaan pendidikan. Peran dari pemerintah daerah bertanggung jawab penuh terhadap peningkatan kualitas pendidikan yang berdampak juga pada jenjang satuan pendidikan. Pada jenjang satuan pendidikan sekolah harus dapat bertanggung jawab untuk mengelola dan mengurus sekolahnya sendiri melalui mekanisme yang sering disebut manajemen berbasis sekolah (MBS). Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan alternatif dari otonomi dalam bidang pendidikan untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, efisiensi dan pemerataan pendidikan yang sesuai dengan keinginan masyarakat.

MBS menurut Bank Dunia (dalam Suparlan, 2013:49) merupakan padanan kata dari *School-based Management* (SBM) yang mengandung pengertian: “*School-based Management is the decentralization of level of authority to the school level. Responsibility and decision-making over school operations is transferred to principals, teachers, parents, sometimes students, and other school community members. The school-level actors, however, have to conform to, or operate, within a set of centrally determined policies*”. (MBS adalah desentralisasi level otoritas penyelenggaraan sekolah level sekolah. Tanggung jawab dan pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan atau penyelenggaraan sekolah telah diserahkan kepada kepala sekolah, guru-guru, para orang tua siswa, kadang-kadang peserta didik, dan anggota komunitas sekolah lainnya.

Mulyasa (2014:24) menjabarkan MBS merupakan paradigma baru pendidikan, yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah (melibatkan masyarakat) dalam kerangka kebijakan nasional. Adapun tujuan MBS menurut Andang (2014:124) adalah “meningkatkan efisiensi, kualitas, pemerataan, dan relevansi pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang luas”. Penerapan MBS menuntut kerja sama yang erat antara pihak sekolah dalam hal ini peran kepala sekolah dan partisipasi masyarakat. Hal ini diperlukan agar penyelenggaraan pendidikan mencapai hasil maksimal untuk mewujudkan kualitas pendidikan yang diharapkan.

Kepala sekolah dan masyarakat merupakan bagian satu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Sekolah yang berada dalam lingkungan masyarakat dengan berbagai macam budaya, karakter masyarakat, strata sosial yang berbeda akan mempengaruhi keberhasilan tujuan pendidikan di sekolah. Peran partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam mewujudkan kualitas pendidikan dengan harapan masyarakat ikut merasa memiliki sekolah, merasa bertanggung jawab atas keberhasilan semua program sekolah. Peran masyarakat diperlukan agar tidak terjadi salah penafsiran terhadap program sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kepala sekolah yang merupakan pemimpin pada tingkat satuan pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian tujuan pendidikan. Pendapat ini senada dengan Mulyasa (2015:16) yang menyatakan bahwa kepala sekolah merupakan pemimpin pada tingkat satuan pendidikan yang harus memiliki dasar kepemimpinan yang kuat. Perspektif kebijakan pendidikan nasional peran kepala sekolah menurut Mulyasa (2013: 98) yakni educator, manajer, administrator, supervisor, leader, innovator, motivator, fasilitator, dan mediator yang sering dikenal dengan istilah EMASLIM-FM.

Peran kepala sekolah dalam perspektif pendidikan nasional penulis jabarkan sebagai berikut:

- a. **Educator**, peran kepala sekolah dalam implementasi MBS yang berperan sebagai educator atau pendidik diharapkan mampu memberikan solusi atau nasehat tentang proses pembelajaran yang menarik yang mampu meningkatkan kualitas peserta didik.

- b. **Manager**, peran kepala sekolah sebagai manajer dalam implementasi MBS diharapkan mampu memberdayakan seluruh sumber daya yang ada dalam mewujudkan kualitas pendidikan yang lebih baik. Kepala sekolah harus mampu bekerja sama baik serta memberikan kesempatan pendidik, tenaga non kependidikan, masyarakat maupun peserta didik untuk meningkatkan profesionalitas.
- c. **Administrator**, peran kepala sekolah dalam implementasi MBS berkaitan dengan peran sebagai administrator diharapkan kepala sekolah mampu memberdayakan segenap komponen yang ada dalam pengelolaan kurikulum, pengelolaan administrasi sarana dan prasarana pendidikan, pengelolaan kesiswaan, pengelolaan ketatausahaan atau kearsipan, dan pengelolaan dalam hubungan dengan masyarakat
- d. **Supervisor**, peran kepala sekolah sebagai supervisor dalam implementasi MBS harus mampu melakukan pengawasan dan pengendalian kepada tenaga pendidik dan non kependidikan dalam kegiatan pendidikan di sekolah untuk mewujudkan kualitas pendidikan. Kepala sekolah harus memberikan.
- e. **Leader**, peran kepala sekolah sebagai leader atau pemimpin dalam implementasi MBS harus mampu membangun komunikasi dua arah sehingga dalam memberdayakan segenap sumber daya dapat maksimal. Kepala sekolah diupayakan memberikan kesempatan kepada tenaga pendidik dan non kependidikan untuk menjalankan tugas sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- f. **Innovator**, peran kepala sekolah sebagai innovator dalam implementasi MBS dengan memberikan ide atau gagasan baru tentang model pembelajaran, menjalin kerjasama dengan masyarakat tentang kebutuhan lulusan yang diharapkan, menjalin kerjasama dengan lingkungan sekitar.
- g. **Motivator**, peran Kepala sekolah sebagai motivator dalam implementasi MBS dengan memberikan motivasi kepada tenaga pendidik dan non kependidikan maupun peserta didik untuk melakukan tugas sesuai dengan fungsinya. Motivasi dapat dilakukan diantaranya dengan membuat peraturan dengan melibatkan seluruh warga sekolah, menciptakan suasana yang kondusif, menyediakan berbagai sumber belajar yang memadai.
- h. **Fasilitator**, peran kepala sekolah sebagai fasilitator dalam implementasi MBS harus dapat memberdayakan segenap kemampuan seluruh tenaga pendidik dan non kependidikan secara terus menerus atau berkesinambungan untuk mewujudkan visi dan misi madrasah. Kepala sekolah dengan bekerja sama dengan masyarakat menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk pengembangan madrasah untuk mewujudkan kualitas pendidikan.
- i. **Moderator**, peran kepala sekolah sebagai moderator dalam implementasi MBS untuk mewujudkan kualitas pendidikan yakni sebagai penghubung antara pihak sekolah, komite sekolah, dewan pendidikan, dan masyarakat sekitar yang peduli akan pendidikan.

Masyarakat selaku pengguna jasa lembaga pendidikan memiliki kewajiban untuk mengembangkan serta menjaga keberlangsungan penyelenggaraan proses pendidikan. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab IV pasal 8 menyatakan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Sedangkan di pasal 9 menyatakan bahwa masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Slameto dan Kriswandani (dalam Rahmat, 2016: 145) menjabarkan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat menjadi tiga kelompok yaitu

partisipasi masyarakat dalam perencanaan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan, dan evaluasi pendidikan.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pendidikan untuk mewujudkan kualitas pendidikan berkaitan dengan keterlibatan masyarakat mengusulkan program-program maupun visi dan misi sekolah. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat, sehingga kebutuhan berkaitan dengan pendidikan yang dibutuhkan masyarakat harus dipertimbangkan untuk mewujudkan kualitas pendidikan yang maksimal. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dalam implemtasi MBS untuk mewujudkan kualitas pendidikan berkaitan dengan keikutsertaan masyarakat dalam berbagai kegiatan sekolah mulai dari penerimaan peserta didik baru, pengadaan guru baru, pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan hingga pengawasan kegiatan sekolah.

Partisipasi masyarakat dalam evaluasi pendidikan berkaitan dengan analisis kekuarangan dan kelebihan program-program yang telah dijalankan sekolah. Berdasarkan analisis tersebut diharapkan sekolah dan masyarakat dapat mewujudkan kualitas pendidikan yang akan datang. Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan melalui berbagai komponen masyarakat, pendidikan berbasis masyarakat, dewan pedidikan, dan komite sekolah/madrasah. Selanjutnya peran serta masyarakat yang terorganisasi diwadahi dalam organisasi yang diberi nama komite sekolah dan lembaga mandiri yang diberi nama dewan pendidikan.

Komite sekolah menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Mulyasa (2015:129) menjabarkan mengenai keanggotaan komite sekolah terdiri atas : a) unsur masyarakat dapat berasal dari: orang tua/wali peserta didik; tokoh masyarakat; tokoh pendidikan; dunia usaha/industry; organisasi profesi tenaga kependidikan; wali alumni; wakil peserta didik, b) unsur komite guru, yayasan/ lembaga penyelenggra pendidikan, Badan Pertimbangan Desa dapat pula dilibatkan sebagai anggota komite sekolah (minimal 3 orang), c) anggota komite sekolah, sekurang-kurangnya berjumlah 9 orang, dan jumlahnya gasal. Kepengurusan Komite Sekolah menurut Mulyasa (2015:130) terdiri dari pengurus yang sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara; pengurus dipilih dari dan oleh anggota; ketua bukan berasal dari kepala sekolah.

Tujuan didirikannya Komite Sekolah menurut Mulyasa (2015:128) adalah: a) mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di madrasah, b) meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, c) menciptakan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan yang bermutu dalam sekolah. Komite sekolah menurut Mulyasa (2015:128) berperan sebagai a) pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan pelaksanaan kebijakan di sekolah, b) pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, c) pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran mutu pendidikan di sekolah, d) mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di sekolah.

Dewan pendidikan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat

nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Anggota dewan pendidikan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari; Pakar pendidikan, b) penyelenggara pendidikan, c) pengusaha, d) organisasi profesi, e) pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya, dan f) pendidikan bertaraf internasional, g) pendidikan berbasis keunggulan lokal, dan/atau h) organisasi sosial kemasyarakatan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti berusaha memberikan penjelasan secara luas dan mendalam serta orisinil. Jenis penelitian yang digunakan adalah fenomenologi dengan harapan mendapatkan informasi otentik dari orang yang sungguh-sungguh mengalami dan menggali bagaimana orang tersebut memberikan makna pada pengalamannya tentang peran kepala sekolah dan partisipasi masyarakat dalam implementasi MBS untuk mewujudkan kualitas pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Madiun.

Jenis data pada penelitian ini adalah data kualitatif bermakna. penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu:

- a. Data primer dalam penelitian ini lebih difokuskan peran kepala sekolah dan partisipasi masyarakat. Data primer ini bersumber dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, komite sekolah, dewan pendidikan, dan beberapa masyarakat sekitar yang peduli akan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Madiun.
- b. Data sekunder dalam penelitian ini di peroleh dari dokumen/ arsip yang berkaitan dengan tema atau judul penelitian ini. Yang termasuk sumber data sekunder: hasil rekaman, foto, hasil instrumen wawancara, hasil observasi tentang peran kepala sekolah dan partisipasi masyarakat dalam implementasi MBS untuk mewujudkan kualitas pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Madiun.

Sesuai dengan masalah dalam penelitian ini, maka sumber data akan diperoleh dari:

1) Informan kunci

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai informan kunci (sumber informasi) adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua komite, ketua dewan pendidik, serta perwakilan masyarakat sekitar yang peduli akan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Madiun.

- 2) Peristiwa, yaitu berbagai peristiwa atau situasi sosial yang diobservasi dan berkaitan masalah atau fokus penelitian. Peristiwa-peristiwa yang diobservasi akan dikemukakan pada teknik pengumpulan data.

- 3) Dokumen yang relevan dengan masalah dan fokus penelitian.

Dokumen diperoleh dari data bagian kurikulum, bagian kesiswaan, bagian sarana dan prasarana, bagian hubungan masyarakat, data di komite sekolah, dan tata usaha.

Teknik pengambilan data menggunakan dengan melakukan observasi, wawancara, mencatat kejadian dan memeriksa dokumen. dengan melakukan observasi, wawancara, mencatat kejadian dan memeriksa dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan melakukan observasi, wawancara, mencatat kejadian dan memeriksa

dokumen dengan menggunakan teknik triangulasi yakni terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.

## Hasil dan Pembahasan

### Peran Kepala Sekolah dalam Implementasi MBS untuk mewujudkan kualitas pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Madiun

Kepala MTs Negeri Kota Madiun memainkan peran penting dalam implementasi MBS. Hal tersebut dapat dideskripsikan pada berbagai peran di bawah ini

#### 1. Peran kepala sekolah sebagai *educator*

Temuan penelitian peran kepala sekolah sebagai *educator* dalam implementasi MBS untuk mewujudkan kualitas pendidikan di MTs Negeri Kota Madiun. Hal tersebut terlihat pada aktivitas-aktivitasnya, yaitu;

- a. Kepala sekolah bekerjasama dengan komite memberikan fasilitas yang menunjang pembelajaran yang tidak dibiayai oleh APBN dan APBD untuk meningkatkan kenyamanan guru dalam proses belajar mengajar di kelas untuk mewujudkan kualitas pendidikan.
- b. Kepala sekolah dalam melaksanakan perannya sebagai *educator* melakukan dengan melakukan pembinaan dan motivasi setiap pagi sebagai sarana *controlling*.
- c. Kepala sekolah memberikan kesempatan untuk olah raga sesuai dengan bakat dan keahlian bapak, ibu guru dan karyawan karyawan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- d. Kepala sekolah memberikan kesempatan guru dan karyawan karyawan untuk mengembangkan profesionalitas diri.
- e. Kepala sekolah selalu memberikan informasi baru tentang kegiatan pembelajaran dan memberikan alternatif pemecahan masalah bagi guru yang mengalami kesulitan dalam mengajar.

#### 2. Peran kepala sekolah sebagai *manager*

Kepala sekolah sebagai *manager* berarti kepala sekolah harus mampu mengelola tenaga kependidikan, salah satu tugas yang harus dilakukan kepala sekolah adalah melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan profesi para guru. Untuk itu Kepala MTs Kota Madiun melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Mendelegasikan semua tugas kepada para wakil kepala sekolah sesuai dengan *job description* masing-masing dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.
- b. Bekerjasama dengan komite dalam implementasi MBS di MTs Negeri Kota Madiun selalu berkoordinasi tentang program-program sekolah dan mengevaluasi program yang telah dilaksanakan.

#### 3. Peran kepala sekolah sebagai administrator

Kepala sekolah sebagai administrator dalam implementasi MBS di MTsN Kota Madiun mampu memberdayakan semua komponen dalam pengelolaan komponen kurikulum, administrasi sarana dan prasarana, kesiswaan, dan kearsipan. Hal ini tampak pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Kepala sekolah mampu mengendalikan tugas yang telah didelegasikan sesuai dengan kualifikasi dan *job description* masing-masing tenaga pendidik dan non kependidikan.
  - b. Kepala sekolah secara berkala meminta laporan pertanggungjawaban kegiatan tenaga pendidik dan non kependidikan sesuai dengan *job description* masing-masing.
4. Peran kepala sekolah sebagai supervisor
- Kepala MTs Negeri Kota Madiun dalam kegiatan supervisi melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. Melakukan supervisi baik secara langsung maupun tidak langsung.
  - b. Membuka diri untuk berkonsultasi bagi guru yang mengalami kesulitan dalam kegiatan belajar mengajar dan memberikan alternatif pemecahan masalah.
  - c. Melakukan pengawasan ataupun pembinaan kepada tenaga non kependidikan bekerjasama dengan kepala tata usaha.
5. Peran kepala sekolah sebagai *leader*
- Kepala sekolah sebagai *leader* atau pemimpin dalam implementasi MBS harus mampu membangun komunikasi dua arah sehingga dalam memberdayakan segenap sumber daya dapat maksimal. Kepala MTs Negeri Kota Madiun berupaya memberi kesempatan kepada tenaga pendidik dan non kependidikan untuk menjalankan tugas sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Hal ini tampak pada aktivitasnya sebagai berikut:
- a. Memberikan petunjuk, arahan, maupun suritauladan bagi tenaga pendidik dan non kependidikan.
  - b. Mendelegasikan tugas, berkoordinasi dan pengawasan.
  - c. Memotivasi dan menjadi inspirasi bagi orang lain yang ada disekitarnya.
6. Peran kepala sekolah sebagai *innovator*
- Inovasi dapat diartikan sebagai temuan yang baru yang belum pernah ada. Peran kepala sekolah sebagai *innovator* dalam implementasi MBS dengan memberikan ide atau gagasan baru tentang model pembelajaran, menjalin kerjasama dengan masyarakat tentang kebutuhan lulusan yang diharapkan, menjalin kerjasama dengan lingkungan sekitar.
- Kepala MTs Negeri Kota Madiun *innovator* dalam implementasi MBS untuk mewujudkan kualitas pendidikan di MTsN Kota Madiun melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. Memberikan ide atau gagasan baru tentang model pembelajaran yang disesuaikan dengan karakter siswa
  - b. Bekerjasama dengan dewan pendidikan dan masyarakat kebutuhan lulusan yang diharapkan, menjalin kerjasama dengan lingkungan sekitar.
  - c. Mencari terobosan baru agar kualitas pendidikan tetap terjaga dan mendapat kepercayaan dari masyarakat.
7. Peran kepala sekolah sebagai motivator
- Kepala MTs Negeri Madiun sebagai *motivator* dalam impelentasi MBS untuk mewujudkan kualitas pendidikan di MTs Negeri Kota Madiun melaksanakan kegiatan sebagai berikut:



- a. Memberikan motivasi dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya dengan berusaha mendengarkan keluhan sebelum mengambil keputusan.
  - b. Memberikan fasilitas yang mendukung program-program sekolah dan kegiatan pembelajaran.
  - c. Memberikan *reward* dan *punishment* bagi tenaga kependidikan dan non kependidikan
8. Peran kepala sekolah sebagai fasilitator
- Kepala sekolah MTs Negeri Kota Madiun sebagai *fasilitator* dalam implementasi MBS untuk mewujudkan kualitas pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Madiun yakni dengan memfasilitasi dalam memberdayakan kemampuan seluruh guru dan tenaga kependidikan secara terus menerus dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan visi dan misi madrasah. Temuan penelitian tentang peran kepala sekolah sebagai fasilitator yaitu
- a. Memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah yang dibutuhkan oleh *stakeholder*.
  - b. Bekerjasama dengan komite sekolah dan masyarakat untuk mewujudkan kualitas pendidikan dan pengembangan madrasah.
9. Peran kepala sekolah sebagai *mediator*.
- Kepala MTs Kota Madiun sebagai *mediator* dalam implementasi MBS untuk mewujudkan kualitas pendidikan yakni sebagai penghubung antara pihak sekolah, komite sekolah, dewan pendidikan, dan masyarakat sekitar yang peduli akan pendidikan. Hal tersebut tampak pada aktivitas sebagai berikut:
- a. Menjadi *mediator* guru dan karyawan, siswa, ataupun pihak-pihak yang ada di sekolah.
  - b. Berusaha menghubungkan antara warga sekolah yang kadang bermasalah dengan warga sekitar sehingga ditemukan solusi yang terbaik.

### **Partisipasi masyarakat dalam implementasi MBS untuk mewujudkan kualitas pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Madiun.**

#### **1. Peran Komite**

Peran komite dalam implementasi MBS di MTs Negeri Kota Madiun untuk mewujudkan kualitas pendidikan yaitu adanya komunikasi dua arah antara sekolah dan komite pada saat perencanaan program-program, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi seluruh.

Temuan penelitian peran serta masyarakat yang tergabung dalam komite maupun dalam dewan pendidikan dalam implementasi MBS untuk mewujudkan kualitas pendidikan di MTsN Kota Madiun, yaitu:

- a. Menyalurkan aspirasi dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan yang ada di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Madiun
- b. Meningkatkan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan di MTsN Kota Madiun.
- c. Mengontrol dan menciptakan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu di MTsN Kota Madiun.

- d. Memberikan pertimbangan (*advisory agency*) dalam menentukan kebijakan yang ada di MTsN Kota Madiun.
  - e. Memberikan dukungan (*supporting agency*) baik yang berupa finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan dari satuan pendidikan.
  - f. Memberikan control (*controlling agency*) dalam rangka penyelenggaraan dan pengeluaran pendidikan di MTsN Kota Madiun.
  - g. Memediasi antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di MTsN Kota Madiun.
  - h. Memberikan bantuan dalam meningkatkan usaha sekolah serta memberikan pembinaan dan pengembangan pendidikan.
  - i. Membantu meningkatkan kelancaran penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar berupa sarana prasarana maupun teknis di pendidikan.
  - j. Membantu mencari dana dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
  - k. Melakukan penilaian sekolah untuk mengembangkan sekolah baik yang berkaitan dengan kurikulum, intrakurikulum maupun ekstrakurikulum.
  - l. Melakukan pembahasan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) MTsN Kota Madiun.
  - m. Mendukung semua kegiatan yang ada dari sekolah guna peningkatan mutu pendidikan yang ada di MTsN Kota Madiun.
2. Partisipasi masyarakat

Temuan penelitian partisipasi masyarakat dalam implementasi MBS di MTs Negeri Kota Madiun untuk mewujudkan kualitas pendidikan yaitu

- a. Kepolisian secara kooperatif ikut serta membantu kegiatan di sekolah berkaitan dengan keamanan dan ketertiban siswa.
- b. Sekolah bekerja sama dengan kelurahan untuk Bina Lingkungan dalam meningkatkan penghasilan masyarakat dengan model Bina Lingkungan.
- c. Masyarakat sekitar menyediakan sarana pendukung untuk melancarkan kegiatan belajar mengajar.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil paparan data dan analisis data ditarik kesimpulan bahwa Kepala MTs Negeri Kota Madiun berperan dalam implementasi MBS dalam mewujudkan kualitas pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Madiun. Kepala MTs mampu sebagai educator, manajer, administrator, supervisor, leader, innovator, motivator, fasilitator, mediator dapat berhasil berdasarkan kemampuan diri dan dukungan dari steacholder, serta partisipasi masyarakat. Masyarakat dalam implementasi MBS dalam mewujudkan kualitas pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Madiun memiliki partisipasi yang tinggi dan dukungan

## **DAFTAR PUSTAKA**

Andang. (2014). *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media

Hidayah, N. (2016). *Kepemimpinan Visioner Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*. Seri Disertasi. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media

Mulyasa, E. (2013). *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung: Rosda

Mulyasa, E. (2014). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Mulyasa, E. (2015). *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara

Rahmat, A. (2016). *Manajemen Humas Sekolah*. Yogyakarta: Media Akademia

Suparlan. (2013). *Manajemen Berbasis Sekolah Dari Teori Sampai Dengan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah